

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Latar Belakang Teoritik

Dinamisasi masyarakat dunia mulai mencolok pasca revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Prancis. Pasca kedua revolusi tersebut masyarakat Barat sangat gencar melakukan pendinamisasian berbagai aspek kehidupannya, khususnya aspek ekonomi dan teknologi sebagai pendukung sekaligus tujuan proses kemajuan itu. Metode menuju kemajuan ala Barat ini terbukti mampu menempatkan masyarakat negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai negara industri maju, yang populer dengan istilah pembangunan.

Pembangunan sebagai metode universal secara terencana lahir diperantarai oleh beberapa alasan. *Pertama*, Sehabis perang dunia kedua, ketika semua negara ambruk akibat perang, maka semangat yang melanda dunia sejak itu adalah membangun negara kembali. *Kedua*, sekitar era 1940-an dan 1950-an banyak negara-negara baru merdeka yang masih miskin dan terbelakang, maka semangat yang melanda negara-negara tersebut adalah melakukan pembangunan. *Ketiga*, pembangunan dijadikan sebagai sebuah ideologi oleh Amerika dan sekutunya (blok barat) pada saat terjadinya perang dingin untuk mempengaruhi negara-negara lain (kebanyakan negara berkembang) agar tidak terangkul dalam pengaruh blok timur yang dimotori Uni Soviet. Sejak itu, pembangunan menjadi

kosa kata "magis" yang dapat mempengaruhi pikiran, perbuatan dan program yang diminati dan dijalani semua orang terutama di negara sedang berkembang.

Atas dasar mitos keberhasilan dan cita-cita besar itu, maka menurut Vandana Shiva¹ pembangunan adalah proyek pasca zaman penjajahan, sebuah pilihan model kemajuan bagi seluruh dunia untuk mencapai kemajuan menurut model kemajuan gaya modern Barat bekas penjajah, tetapi tanpa mengalami ditaklukkan dan dikuras lebih dahulu, seperti terjadi dalam zaman kolonial. Asumsi Shiva, kemajuan gaya Barat dapat diwujudkan di mana saja. Menurutnya bahwa pembangunan dalam arti meningkatkan taraf hidup semua orang berarti menjadikan kategori-kategori ekonomi: kebutuhan, produktivitas dan pertumbuhan-kategori ekonomi Barat.

Mitos kesuksesan ini menempatkan pembangunan gaya Barat sebagai rujukan sekaligus metode universal yang mendeterminasi program dan pelaksanaan pembangunan di hampir seluruh dunia khususnya negara-negara sedang berkembang. Ada keyakinan bahwa pembangunan ala Barat dapat meningkatkan penghasilan secara eksponensial dan merata yang pada gilirannya juga dapat menjembatani masyarakat miskin menuju masyarakat kaya. Jelasnya, bila mengikuti pembangunan gaya Barat, maka niscaya dapat menggapai kesejahteraan, baik kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Berpijak pada asumsi itu, maka pilihan atas pembangunan-meminjam istilah Bank Dunia-"sudah menjadi keinginan yang universal^{2"} untuk segera dilakukan

¹ Vandana Shiva, *Bebas dari Pembangunan*, Yayasan Obor, Jakarta, 1997, hal. 1.

² Bruce Rich, *Menggadaikan Bumi*, Infid, Jakarta, 1999, hal. 275.

Mengikuti mitos itu, Indonesia, seperti banyak negara sedang berkembang lainnya, terperangkap cita-cita pembangunan gaya modern tersebut. Sejak Soeharto naik tahta (ORBA), maka, pembangunan sebagai metode dipilih, diadopsi dan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Model pembangunan di Indonesia mengikuti pembangunan global, di mana ada sistem *metropolis-satelit*³ atau *pusat-pinggiran*⁴. Konsepsi pusat-periferi dari kalangan Marxis-Neo-marxis melihat periferi tetap terbelakang karena secara ekonomi mereka didominasi oleh pusat kapitalis maju secara terus menerus mengambil kekayaan dari mereka⁵. Realitas pembangunan di Indonesia sejalan dengan konsepsi pusat-periferi, di mana pemerintah pusat lebih memfokuskan pembangunan di pulau Jawa pada umumnya dan Jakarta khususnya sebagai sentral dari aktivitas ekonomi nasional. Pemerintah pusat selalu memonopoli segala aktivitas kenegaraan tak terkecuali urusan ekonomi. Sementara pemerintah dan masyarakat daerah hanyalah sebagai pendukung dan penjaga kebijakan pusat. Artinya, masyarakat dan pemerintah daerah sebagai periferi dari Jakarta tetap terbelakang karena kurang mendapat kesempatan untuk menggunakan hasil lebih dari pembangunan. Hasil dari aktivitas ekonomi lebih banyak tersedot ke

³ Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal. 239-240. Terminologi Metropolis-satelit ini dipopulerkan oleh Andre Gunder Frank, di mana menurutnya bahwa keterbelakangan tidak dipahami sebagai "keadaan asli" tetapi keterbelakangan lebih dipandang sebagai sesuatu yang dicipta dalam masyarakat pra-kapitalis yang telah mengalami bentuk-bentuk hubungan ekonomi dan politik tertentu dengan satu atau lebih masyarakat kapitalis. Pendekatan atau teori ini terkenal dengan sebutan teori ketergantungan.

⁴ Stephen K. Sanderson, *ibid.* Istilah pusat-pinggiran yang dipopulerkan Wallerstein, di mana substansinya sama dengan Andre Gunder Frank bahwa keterbelakangan disebabkan oleh hisapan negara kapitalis.

⁵ Stephen K. Sanderson, *ibid.*, hal. 240.

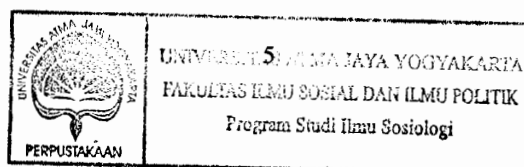
pemerintah pusat sementara pemerintah dan masyarakat di daerah hanya menanti "belaskasihannya" dari pusat. Masyarakat di daerah (termasuk Yogyakarta) diabaikan dan sampai tingkat tertentu dipinggirkan terus karena baik hasil lebih pembangunan maupun konsentrasi pemerintah lebih terfokus untuk memperkokoh Jakarta sebagai pusat ekonomi maupun politik. Konsepsi di atas hanya mungkin relevan bila dipakai dalam menganalisis fenomena makro (hubungan antara negara maju dan berkembang atau antara pusat dan daerah dalam sebuah negara) di mana periferi terus terbelakang karena selalu tergantung dan oleh karenanya senantiasa dikendalikan pusat.

Konsepsi pusat-periferi dalam konteks mikro khususnya dalam tulisan ini lebih melihat hubungan antara komunitas periferi (RT dan RW) dan pusat ekonomi, (semisal Jagalan Ledoksari dan Malioboro) berada dalam posisi yang kurang lebih saling menguntungkan satu terhadap yang lainnya. Misalnya, warga Jagalan Ledoksari pada umumnya menggantungkan nasibnya di Malioboro khususnya dalam hal mencari pekerjaan, tempat yang strategis untuk menjual atau mendapatkan bahan mentah untuk usahanya. Mereka pada umumnya bergerak di sektor ekonomi informal (bakul, pengrajin, dll) yang turut meramaikan dan menjual barang dagangannya di Malioboro. Demikian sebaliknya para investor di Malioboro selalu mengharapkan tenaga kerja dari daerah sekitarnya (termasuk Jagalan Ledoksari).

Konsepsi pusat-periferi dalam tulisan ini bersifat saling melengkapi satu terhadap yang lainnya, di mana pusat membutuhkan periferi demikian sebaliknya bahwa periferi membutuhkan pusat. Sehingga kedua konsep di atas berbeda arti dengan konsepsi kalangan marxis maupun Neo-marxis.

Pada tingkat makro pelaksanaan pembangunan di Indonesia hanya melihat keberadaan institusi pemerintah daerah serta (partisipasi masyarakat daerah: tambahan penulis) lebih banyak bertindak sebagai pelaksana dan pengaman terhadap kebijakan yang diturunkan dari pusat-Jakarta⁶. Kecilnya sumber daya dan kesempatan atas pemerintah dan masyarakat di daerah untuk menguasai dan menjalankannya menyebabkan sulitnya pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan serta kesalahan-kesalahan yang dilakukan perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang mendapatkan ijin dari pemerintah pusat. Bahkan alokasi penerimaan pendapatan ke pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan masyarakat sangat kecil karena dana yang ada sudah mengalir ke "saku-saku" pemerintah pusat atas nama seluruh rakyat Indonesia sebagai justifikasinya. Parahnya lagi, pembangunan yang dilaksanakan biasanya tanpa negosiasi dan kompromi antara pemerintah dengan masyarakat di daerah. Padahal pemerintah dan masyarakat daerah yang sebenarnya lebih memahami dan mengetahui kebutuhan, kemampuan warga masyarakatnya, lingkungan, modal sosial dan segala potensi yang mbingkai dan meregulasi tata hidupnya. Semua harus mengikuti dan tunduk pada kebijakan dan aturan dirancang dari pusat yang mengatasnamakan pertumbuhan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia sebagai pembedanya.

⁶ Abdon Nababan, "Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia", *CSIS*, 1995-6, hal. 421-435.



Fenomena dan masalah pembangunan di atas dapat dianalogikan dengan konsep "*enclosure*" dari Martin Heidegger⁷. Definisi *enclosure* menurut *Oxford Dictionary English* adalah "menyisipkan ke dalam sebuah kerangka atau latar belakang". Sebagai proses sejarah, "pemagaran" bermakna lebih dari sekedar memagari dan pengambil alih daerah penggembalaan orang Inggris di abad Ke-18. Pemagaran merupakan dinamika sosial dan ekonomi dari modernitas itu sendiri, yang merobek "masyarakat serta tanah, hutan, ketrampilan, teknologi dan kosmologi mereka dari budaya asal", dan kemudian ditata ulang ke dalam kerangka baru bagi penggunaan dan pembangunan yang dirasionalisasikan. Hal ini merupakan proses memisahkan konteks dan pola sosial asal dalam penggunaan sumber-sumber kehidupan dan penyusunan ulang potongan-potongannya dalam satu kerangka baru, yang pada akhirnya semua alam dan umat manusia menjadi arena terbuka bagi penggunaan akal instrumental. Sedangkan "beberapa potongan yang tidak cocok dengan kerangka baru itu disingkirkan.

Menurut argumentasi Heidegger bahwa pembangunan modern menuntut nilai-nilai lokal yang tidak sesuai dengan logika pembangunan, seperti, kemampuan lokal untuk mendefinisi, membenahi dan membangun komunitasnya seturut nilai, pranata dan mekanisme lokal, seperti hakikat hubungan dengan sesama, alam, jaringan, kepercayaan, kerja sama, keharmonisan, gotong-royong, ikatan solidaritas yang kuat dan kekeluargaan harus dikeluarkan dari dinamika modernitas. Alasannya, para pendukung pembangunan modern berasumsi bahwa nilai, pranata dan mekanisme masyarakat lokal kebanyakan tidak sejalan bahkan

⁷ Bruce Rich, *Op. Cit.*, hal 321-322.

merupakan tumpuhan dan harapan hidupnya. Artinya, jaringan sosial berperan dalam menjembatani, mendistribusi dan mendiseminasi barang, jasa dan informasi dari dan ke komunitasnya.

1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tentang adanya jaringan sosial lokal sebagai penggerak pembangunan komunitas periferal dapat dipakai sebagai jalan alternatif sekaligus solusi. Artinya, pembangunan yang berbasiskan mengikuti jaringan sosial sebagai modal sosial yang dibangunnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah jaringan sosial sebagai modal sosial berperan dalam menggerakkan pembangunan komunitas periferal?

- a. Bagaimanakah proses pembentukan jaringan sosial?
- b. Bagaimanakah peran jaringan sosial dalam mewujudkan integrasi sosial?
- c. Bagaimanakah peran jaringan sosial dalam mempertahankan dan mengembangkan ekonomi lokal?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini terbagi atas tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus. Tujuan umum diupayakan memberikan sumbangan pemikiran demi memperkaya kanzanah perkembangan ilmu pengetahuan sosial, seperti sosiologi pembangunan dan studi ekonomi pembangunan. Tujuan khusus penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jaringan sosial sebagai modal sosial yang dilakukan masyarakat yang mempunyai fungsi, diantaranya fungsi

ekonomis dan sosial. Keberadaan jaringan dimungkinkan memberi kontribusi mempertahankan imunitas sekaligus menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam komunitas periferal.

1.4 KERANGKA TEORI

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa perangkat konseptual sebagai *guidance* berikut membantu penulis dalam mengurai dan menganalisa fenomena dan masalah yang ada. Oleh karena itu, di sini dipaparkan anatomi perangkat-perangkat itu. *Pertama*, kelahiran komunitas periferal, *kedua*, budaya kaum periferal, *ketiga*, modal sosial, dan *kempat*, jaringan sosial serta relevansinya dengan pembangunan.

Penulis merasa bahwa memahami komunitas periferal terlebih dahulu perlu mengetahui secara umum penyebab lahirnya kaum ini. Menurut Soegeng Sarjadi¹³, ada tiga penyebab lahirnya massa periferal di perkotaan. *Pertama*, perpindahan penduduk dari desa ke kota atau sering disebut migrasi desa-kota atau urbanisasi. *Kedua*, meningkatnya jumlah penggusuran di perkotaan sebagai bagian tak terpisahkan dari perbaikan tata kota. *Ketiga*, adanya penduduk asli kota yang tidak dapat memanfaatkan hasil-hasil pembangunan kota, sehingga mereka selalu dalam kelompok periferal.

Menurut Soeharso, Singh dan Dwyer, perpindahan penduduk dari desa ke kota terjadi karena kekurangan tanah, pendidikan rendah dan motivasi ekonomi¹⁴. Kekurangan tanah disebabkan oleh intervensi negara yang terlalu kuat mengatur sistem pertanahan. Kepastian hukum atas hak-hak komunal merupakan kunci atau

¹³ Soegeng Sarjadi, *Kaum Pinggiran, Kelas Menengah Quo Vadis*, Gramedia, Jakarta, 1994.

¹⁴ Soegeng Sarjadi, *ibid.*

prasyarat utama dalam pengelolaan sumber daya yang lestari. Walaupun undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 mengakui adanya tanah-tanah ulayat, tetapi sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaan yang jelas. Di pihak lain, undang-undang lain, yang mengatur sektor-sektor ekstraktif, seperti kehutanan dan pertambangan sama sekali tidak mengakui hak-hak ulayat¹⁵, kalau pun diakui hanya sebatas *kamuflase* dalam tataran legal.

Tingkat pendidikan dan keterampilan rendah di satu sisi dan motivasi ekonomi di sisi lain, sementara di saat bersamaan penetrasi pasar dan uang ke daerah yang dibawa oleh para kapitalis lokal, tengkulak, misalnya, menyebabkan terjadinya peningkatan monetisasi masyarakat desa. Mereka terangsang dan ingin berintegrasi ke dalam sistem ekonomi uang, hal ini mendorong mereka untuk pergi ke kota guna mendapatkan uang secukupnya. Namun, kedatangan mereka tidak mampu diserap oleh sektor ekonomi formal di perkotaan. Akibatnya, mereka berpaling pada sektor informal di samping sebagian lagi menganggur.

Kemunculan massa periferal juga disebabkan karena penggusuran pemukiman penduduk. Perkembangan kota menuntut adanya penyesuaian tata kota, sehingga seringkali kampung-kampung yang dirasa kumuh dan sembrawat menurut pemerintah segera digusur dan kemudian dibangun beberapa sarana umum dengan alasan demi kepentingan masyarakat juga. Didasarkan pada alasan tata kota dan pemanfaatan ruang demi kepentingan umum, maka pemerintah melakukan penggusuran tanpa pertimbangan obyektif berdasarkan kenyataan empiris di lapangan.

¹⁵ Abdon Nababan, *Loc. Cit*, hal. 431-432.

Kegagalan penduduk asli perkotaan menyesuaikan diri dengan kecepatan pembangunan kota, merupakan salah satu faktor penyebab munculnya massa periferal. Mereka cenderung mempertahankan nilai siklus, seperti tidak disiplin, tidak memandang perlu belajar sampai ke pendidikan tinggi dan tidak mampu berkompetisi. Kondisi ini mendorong dan memantapkan mereka menjadi massa periferal. Secara alamiah, mereka terdesak oleh pendatang baru yang lebih agresif dan mempunyai pendidikan dan keterampilan lebih tinggi atau kemampuan manajemen lebih baik¹⁶.

Menemukan kaum periferal kota beserta karakteristik yang melekat padanya, khususnya di negara-negara berkembang, tidak sulit. Pada umumnya, mereka berprofesi sebagai pengemis, pedagang kaki lima, penjual makanan jalanan, tukang parkir, penyemir sepatu, tukang becak, tukang bakso, gelandangan yang hadir di pusat-pusat keramaian. Seperti, di sekitar stasiun kereta api, pasar, terminal dan daerah pertokoan. Kaum periferal ini tinggal di kawasan pemukiman kumuh, misalnya, di sepanjang pinggiran sungai atau jalan kereta api, atau di kampung-kampung padat di belakang dan sekitar kawasan pertokoan. Kawasan pemukiman kaum periferal pada umumnya merupakan sarang pertumbuhan kejahatan, pelacuran, perjudian, pemabuk, kenakalan remaja dan sebagainya¹⁷. Mereka tidak bisa keluar dari kondisi hidupnya karena-budaya-meminjam-Oscar Lewis¹⁸ disebut "budaya kemiskinan". Hal ini terjadi tatkala mereka terperangkap dalam kelompok yang dipinggirkan oleh sistem yang dominatif.

¹⁶ Soegeng Sarjadi, *Op. Cit* hal. 19.

¹⁷ Darwis Khudori, *Menuju Kampung Pemerdakaan*, Yayasan Pondok Rakyat, Yogyakarta, 2002, hal. 116-117.

¹⁸ Darwis Khudori, *ibid*.

Clinard¹⁹ menemukan tiga ciri dominan penduduk permukiman kumuh, yakni: "perilaku menyimpang" (*deviant behaviour*), "budaya permukiman kumuh" (*culture of slums*) dan "apatisme dan keterasingan sosial" (*apathy and social isolation*). "Perilaku menyimpang", seperti kejahatan, kenakalan remaja, pelacuran, minuman keras, perjudian, narkoba, sejak lama telah dikaitkan dengan kehidupan permukiman kumuh sebagaimana terdapat di Chicago, Milwaukee, Cleveland, Jacksonville (Florida), Indianapolis, Jakarta, Kali Code dan lain-lain.

"Budaya permukiman kumuh" merupakan sintesa dari budaya kelas bawah dengan apa yang disebut Lewis budaya kemiskinan. Pengamatan Clinard tentang kaum periferal di mana mereka selalu hidup berkelompok dan berpusat dengan mudah menemukan warung, kawan, kios dan tempat peminjaman uang. Kehidupan komunitas periferal ini selalu ditandai oleh: kehidupan privasi jarang ditemukan, sering mengandalkan otot, kekacauan jarang diselesaikan secara tuntas, hidup serba permissif, masalah selalu diselesaikan dengan kekerasan, kehidupan seks yang bebas dan ada toleransi terhadap perilaku menyimpang, misalnya, kenakalan dan apatis dengan hidup sehingga mengarah menjadi *fatalis*. Kehidupan mereka sering ditandai dengan kecurigaan atas "dunia luar", seperti pemerintah, polisi, politisi, pekerja sosial dan golongan menengah dan atas pada umumnya. Mereka sering kehilangan kesempatan atas fasilitas umum, seperti kesehatan, pendidikan, dan jasa polisi serta adanya perasaan kuatir akan ancaman dari luar. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman mereka tentang kesehatan

¹⁹ Darwis Khudori, *ibid.*

dan pendidikan. Kehidupan kaum periferal selalu diatur dan diregulasi oleh "irama" pengangguran, kekurangan pekerjaan dan gaji atau pendapatan rendah. Mereka tidak memiliki kesadaran akan sikap, tingkah laku dan tanggung jawab dalam membela hak hidup, tidak mengenal kehidupan yang teratur dan selalu dirundung ketidakpastian sehingga menyebabkan kehidupan keluarga mereka labil. Lebihnya lagi, mereka tidak mengenal tradisi menabung, merancang masa depan dan menyimpan cadangan makan secara antisipatif. Mereka sering menggadaikan barang-barang tanpa diikuti pertimbangan secara matang.

"Apatisme dan keterasingan sosial". Masyarakat umum beranggapan bahwa penampilan fisik dan kesulitan hidup permukiman kumuh adalah penjelmaan dari "kodrat rendah" (*natural inferiority*). Asumsi publik mengatakan bahwa tempat tinggal mereka adalah tempat yang kumuh atau tempat yang rendah maka penghuninya juga rendah. Anggapan ini membuat mereka terasing dan terlempar dari partisipasi dalam proses pembangunan masyarakat luas. Parahnya lagi, anggapan mereka terhadap dirinya tidak terlepas dari anggapan masyarakat umum atas dirinya. Mereka menyadari kondisi hidup rendah dan berusaha keras untuk memperbaikinya, tetapi lebih cenderung menerima kenyataan secara apatis dan apa adanya. Jelasnya, mereka tidak mampu mengubah kondisi hidup. Sayangnya, realitas ini disertai pula oleh sikap dan perilaku mereka yang mempercayai kelemahan diri sebagai pembelar ketakberdayaannya itu. Menurut mereka keberhasilan seseorang keluar dari kondisi demikian lebih dianggap sebagai keberuntungan ketimbang hasil usaha, kebetulan atau ganjaran daripada hasil perencanaan dan kecakapan.

Setelah melihat dan merasakan berbagai pilihan dan implikasi dari pembangunan kontemporer sebagai penggerak dinamisasi masyarakat, ternyata bukan hanya berdampak positif dalam rupa kesejahteraan, tetapi menghadirkan periferalisasi sejumlah besar umat manusia sampai titik paling nadir. Kenyataan ini menginspirasi munculnya wacana modal sosial sebagai tandingan sekaligus jawaban alternatif atas realitas faktual tersebut.

Lahirnya kaum periferal yang disebabkan oleh sistem yang diskriminatif disertai hegemoni budaya lama tidak serta merta mereka identik dengan orang tak berdaya sama sekali atau kehilangan segala-galanya. Berdasarkan *research* para ilmuwan sosial menemukan bahwa ternyata hampir di setiap masyarakat memiliki modal yang dapat memfasilitasi warga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan memelihara integrasi sosial. Hasil penelitian tersebut disistematisasikan dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan modal sosial. Pengertian modal sosial yang berkembang selama ini lebih banyak didasarkan pada pandangan tiga orang ilmuwan sosial dunia, yaitu : Piere Bourdie, James Coleman dan Robert Putnam²⁰. Bourdieau²¹ mendefinisikan modal sosial sebagai "sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal-balik (karena keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif". Lebih mengutamakan proses

²⁰ Laporan Akhir Tim Fisipol UGM, *Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-nilai Kemasyarakatan (Social Capital) untuk Integrasi Sosial*, Fisipol UGM, 2001, hal. 5.

²¹ Laporan Akhir Tim Fisipol UGM, *ibid*, 2001, hal. 6.

hubungan yang terus dimodifikasi dan bersifat "kekal", yang diikat oleh *trust* dalam meningkatkan kohesivitas dalam kelompok. Hubungan sosial berupa pertetanggaan, pertemanan, kekeluargaan yang bersifat wajib antar satu dengan yang lainnya.

Modal sosial menurut James Coleman²² mempunyai dua ciri, yaitu aspek struktur sosial serta memperantarai tindakan seseorang dalam struktur sosial tersebut atau dalam sosiologi populer disebut asosiasi. Dalam konteks ini modal sosial mencakupi sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan yang berfungsi sebagai kerangka acuan, pedoman, penjaga keutuhan, pemberi pegangan bagi seluruh wargamasyarakat.

Robert Putnam²³ mendefinisikannya sebagai "ciri-ciri kehidupan sosial-jaringan, norma, serta rasa percaya (*trust*) yang bisa mengikat semua warga bertindak efektif guna mencapai tujuan tertentu. Asosiasi yang dibangun itu yang melibatkan hubungan tatap muka, hubungan horisontal antar individu yang diikat *trust*, dan memiliki kemampuan untuk bersama-sama sebagai modal paling vital dalam membangun kehidupan demokratis baik secara ekonomi pun sosial.

Ismail Serageldin²⁴ mendefinisikannya sebagai jalinan-jalinan ikatan budaya, *governance*, dan *social behaviour* yang membuat sedemikian rupa sehingga fungsi dan tatanan sebuah masyarakat adalah lebih dari sekedar jumlah individu. *Social capital* dan wujudnya sebagai kelembagaan inilah sumber legitimasi berfungsinya tatanan masyarakat untuk mendukung baik pertumbuhan

²² Laporan Akhir Tim Fisipol UGM, *ibid*, hal. 6.

²³ Laporan Akhir Tim Fisipol UGM, *ibid*, 2001, hal. 7.

²⁴ Iwan Nugroho, "Modal Sosial dan Perkembangan Kota", *Prisma*, No. 6. 1997, hal. 4.

ekonomi, keberlanjutan pembangunan, maupun untuk kepentingan mediasi terhadap konflik dan kompetisi. Modal sosial ini dibangun sebagai sebuah institusi yang mengerangkai berbagai aktivitas yang bersifat progressif dan pranata mediatif menyelesaikan berbagai problematika kehidupan dalam masyarakat. Dari deskriptif batasan-batasan modal sosial di atas, tim peneliti Fisipol UGM²⁵ mengkategorisasikan ke dalam tiga tingkat modal sosial, yaitu pada tingkat nilai, institusi, dan mekanisme. *Pertama*, pada level nilai, modal sosial bisa dalam bentuk, simpati, rasa berkewajiban, percaya, pertukaran dan pengakuan serta penerimaan timbal-balik. *Kedua*, pada level institusi, modal sosial dapat berwujud *civic engagement*, kebiasaan yang melembaga, asosiasi, dan jaringan sosial. *Ketiga*, pada level mekanisme, modal sosial dapat berupa perilaku saling membantu, kerja sama dan interaksi sinergi satu sama lainnya.

Keberadaan modal-modal ini tidak terlepas dari komunitas di mana anggota-anggota warganya berada. Memahami modal sosial lokal terlebih dahulu perlu memahami komunitas dan dinamika yang menyertainya. Bertolak dari sana pembangunan yang berpusat pada rakyat (komunitas) perlu mengenal dan mengerti karakteristik dan muatan-muatan di dalamnya. Batasan yang diberikan atas komunitas bervariasi tergantung pada kepentingan dan kriteria yang dipakai. Ada yang berdasarkan lokalitas, historisitas, asal-usul, dan tujuan. Secara umum komunitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut; 1) berisi kelompok manusia, 2) menempati suatu wilayah geografis, 3) mengenal pembagian kerja ke dalam spesialisasi dengan fungsi-fungsi yang saling bergantung, 4) memiliki kebudayaan

²⁵ Laporan Akhir Tim Fisipol UGM, *Op. Cit*, 2001, hal. 9.

dan sistem sosial bersama yang mengatur kegiatan mereka, 5) para anggotanya sadar akan kesatuan serta kewargaan mereka dari komunitasnya, dan 6) mampu berbuat secara kolektif menurut cara tertentu²⁶.

Demi memperjelas gambaran tentang komunitas, penulis perlu berpaling pada buah pikiran sosiolog Ferdinand Tonnis²⁷ tentang paguyuban dan patembayan. Menurutnya, *gemeinschaft* ditandai oleh ikatan batin yang murni dan kekal antara para anggota dan ada rasa cinta dan kesatuan batin yang telah dikodratkan yang bersifat nyata. Hal ini dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga dan rukun warga. Lebih jauh Tonnis menyebutkan bahwa paguyuban memiliki ciri-ciri pokok, seperti, hubungan menyeluruh yang mesra (*intim*), hubungan yang bersifat pribadi (*private*) dan hubungan itu terbatas dalam kelompoknya (*eksklusive*). Realitas ini dibentuk oleh kemauan azasi manusia, yang disebut *wesenwille*. *Wesenwille* adalah bentuk kemauan yang alamiah-kodrati yang timbul dari keseluruhan kehidupan alami-natural. Di dalam *wesenwille* perasaan dan akal merupakan kesatuan dan dua-duanya terikat pada kesatuan hidup yang alamiah dan organis. Paguyuban lebih dilandasi oleh solidaritas dan kesatuan pribadi konkrit tanpa pamrih yang direkatkan oleh kolektivitas, komunalitas, lokalitas, historisitas, dan genealogi.

Patembayan merupakan ikatan yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, dalam bentuk pikiran belaka (*imaginary*), dan struktur bersifat organis, seperti dalam ikatan timbal-balik, ikatan antara pedagang, ikatan dalam suatu perusahaan, dan lain-lain. Ikatan ini dibentuk oleh kemauan asasi yang

²⁶ N. Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 9.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal. 217-218.

disebut *kurwille*. *Kurwille* adalah kemauan yang ditujukan pada tujuan-tujuan tertentu dan rasional sifatnya. Patembayan dibentuk karena kesamaan kepentingan dengan pertimbangan rasional dan perhitungan untung rugi..

Dua tipe komunitas di atas, yaitu: paguyuban dan patembayan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Paguyuban dan patembayan juga mempunyai sifat-sifat, diantaranya terdapat potensi lokal, seperti kerjasama, saling tergantung, saling membantu, jaringan sosial, saling percaya, kebersamaan dan saling mengenal. Gambaran komunitas beserta modal sosial, membawa kita pada pemappingan modal sosial yang dilakukan oleh tim peneliti UGM²⁸ dan L. Jehamat²⁹ ke dalam tiga level, yaitu: level nilai, institusi dan mekanisme.

a. Level Nilai

Nilai adalah "sesuatu" yang dikejar orang, karena menarik, menyenangkan, berguna, atau mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Secara ringkas nilai mempunyai beberapa pengertian. *Pertama*, nilai sangat tergantung pada subjek yang memberi penilaian atau penafsiran. *Kedua*, nilai selalu tampil dalam konteks yang praktis. *Ketiga*, nilai merupakan sifat-sifat yang ditambahkan atau dilekatkan oleh subjek pada objek³⁰. Nilai-nilai ini terdiri dari nilai sopan santun dan moral yang menjadi acuan, panduan, arahan dan pedoman yang mengerangkai, meregulasi dan membatasi tata kelakuan dalam komunitas masyarakat. Nilai-nilai yang sempat diidentifikasi dan dipilah-

²⁸ Laporan Akhir Tim Fisipol UGM, *Op. Cit*, 2001.

²⁹ Lasarus Jehamat, "Tradisi Arisan Sebagai Modal Sosial (*Social Capital*) Dalam Rangka Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) di Dusun Guwo, Triwidadi, Pajangan, Bantul", SKRIPSI Strata Satu (S-1), Jurusan Ilmu Sosiatri, Fisipol UGM, 2003.

³⁰ Agus Tridiatno, *Masalah-masalah Moral*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hal. 10.

pilih oleh penulis ada enam (6). Penulis berasumsi bahwa nilai-nilai inilah yang lebih determinan dalam komunitas. Nilai-nilai itu antara lain :

1. Nilai Kerjasama (*Kooperatif*)

Nilai ideal ini lebih didasari pada sifat saling membutuhkan, hal ini terjadi manakala setiap warga menyadari secara alamiah bahwa keberadaan dan keberlangsungan akan eksistensinya tidak mungkin dipenuhi secara individual. Dia memerlukan orang lain dalam memenuhi maupun melengkapi kebutuhan hidupnya sebagaimana normalnya makhluk sosial. Dengan demikian di dalam rutinitas hidup, setiap warga saling bergantung satu dengan yang lainnya. Hal inilah mendorong terjalinnya hubungan kerjasama antar warga dalam memenuhi sekaligus menyelesaikan perkara hidup baik secara individual maupun secara kolektif.

2. Nilai Harmonis dan Kerukunan

Prinsip ini dikonstruksikan secara sosial melalui adaptasi transformasi aktif berikutnya integrasi demi menjamin ikatan emosional yang menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerjasama sebagai fondasi mencapai tujuan-tujuan bersama dengan mengacu pada nilai-nilai yang telah disepakati sehingga tercapai keseimbangan dalam rupa keharmonisan dan kerukunan. Nilai ini dilaksanakan dengan menghindari perselisihan dan percekocokan, baik bersifat *manifest* pun *latent* dengan cara tolong-menolong ataupun ritual-ritual keagamaan yang dilaksanakan secara bersama-sama.

3. Saling Percaya (*Mutual Trust*)

Saling percaya merupakan salah satu nilai paling esensial yang mensyaratkan pada masing-masing anggota untuk tetap memahami, mengerti, memegang, dan mematuhi apa yang telah menjadi komitmen bersama bagi terselenggaranya kehidupan komunitas. Keberadaan komunitas mensyaratkan pada keberlangsungan *mutual trust*, kelanggengan *mutual trust* bergantung pada komitmen warga, dan komitmen warga bergantung pada kesadaran para anggota akan manfaat saling percaya bagi segenap anggota komunitas.

4. Solidaritas dan Saling Membantu

Solidaritas menunjukkan pada satu keadaan hubungan antar individu atau antar kelompok yang dikerangkai perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Hal ini dilandasi oleh kesadaran kolektif akan adanya kebersamaan secara total. Totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama itu³¹. Solidaritas yang diikat oleh lokalitas, komunalitas, kepercayaan, perasaan, kesadaran akan kebersamaan dan tujuan tertentu. Hal ini nampak dalam kerja saling membantu dan membagi antar warga. Dalam konteks dan kondisi tertentu warga menempatkan loyalitas kelompok di atas loyalitas individu sebagai bentuk tanggung jawab atas komunitasnya.

5. Etos Kerja

Etos kerja termanifestasi melalui aktivitas dan upaya yang ditempuh dalam mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Semangat ini

³¹ Paul Doyle Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I* (terjem. R. M. Z. Lawang), Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 183.

accounts. Many are incalculable, being based on affection or obligation within a family, extended family, or friendship network³⁷.

Jadi, jaringan sosial informal bersifat alami antar individu satu terhadap yang lain (*face-to-face*) dan secara bersama-sama diikat oleh ikatan kekeluargaan, persahabatan dan keakraban. Dalam pengertian sosiologis jaringan informal memiliki pola dan interaksi yang berulang-ulang (*pranata*). Meskipun jaringan informal memiliki identitas formal, seperti pengakuan terhadap hukum, punya jam kerja yang tetap, punya aturan yang tertulis dan punya dana sendiri-namun identitas jaringan informal tersebut bukanlah sebagai tanda institusi formal. Jaringan informal ini cenderung bersifat horisontal, menyebar dan reputasi individu lebih membantu kerja sama ketimbang dalam aturan birokrasi. Hasil dari jaringan informal adalah layanan mandiri berskala kecil, misalnya gotong-royong pembangunan rumah, penitipan anak atau menyediakan informasi dan berkomunikasi. Aktivitas sosial ekonomi di atas (*jaringan informal*) biasanya lepas dari hitungan resmi pemerintah. Karena, aktivitas sosial ekonomi tersebut didasarkan pada kalkulasi afeksi, seperti, tanggung jawab keluarga dan lain-lain.

Sementara itu juga Rose menjelaskan organisasi formal sebagai salah satu sumber terjadinya jaringan sosial, seperti yang digambarkan di bawah ini:

Formal organizations are rule-bound, bureaucratic, and they have legal personality and secure revenue from the market or the state. A formal organization can have individuals as its members (for example, a professional association doctors), or its members can be organizations (for example, an association of hospitals). However, the links between actual individuals and organization of organizations are intermediated many times-for example, the relation between the managers of a joint stock firm and its nominal owners. Formal organizations are a necessary part of a *modern society*, for it requires impersonal bureaucratic

³⁷ Partha Dasgupta dan Ismail Serageldin, *ibid*, 1999.

organization of state and market that can routinely produce complex goods such as automobiles, and services such as university education³⁸.

Inti dari gagasan di atas menunjukkan bahwa organisasi formal memiliki aturan yang pasti, birokratis dan memiliki aturan-aturan pasti yang mengikat individu dengan negara dan pasar. Organisasi formal dapat menempatkan individu sebagai anggota, seperti di kalangan profesional atau keanggotaan yang didapat dari organisasi, seperti asosiasi rumah sakit. Bagaimanapun, hubungan aktual antar individu, antar organisasi yang bersifat formal suatu ketika akan berlanjut ke hubungan informal, seperti antar manager perusahaan dengan pemilik saham perusahaan. Itu berarti bahwa hubungan ekonomi dapat berlanjut ke hubungan sosial. Dalam masyarakat modern organisasi formal itu sangat diperlukan sehingga dibutuhkan organisasi birokratik *impersonal* dari negara dan pasar yang secara rutin menghasilkan barang dan jasa.

Untuk keperluan pembahasan ini, tipe jaringan sosial informal menjadi fokus perhatian. Penulis melihat bahwa tipe jaringan sosial informal paling banyak ditemukan pada tingkat komunitas yang bersifat paguyuban, seperti, komunitas Jagalan Ledoksari. Sebagai gambaran, di bawah ini akan diberikan ilustrasi-penjelasan awal tentang jaringan sosial informal sebagai instrumen penopang jaringan sosial. Upaya komunitas perifer (semisal Jagalan Ledoksari) menggalang dan membangun jaringan sosial merupakan kecerdasan lokal dalam menjawab tuntutan kondisi subyektif dan obyektif para warga-komunitas. Upaya yang dilakukan untuk membentuk dan memperkuat jaringan pada gilirannya dapat memperkuat solidaritas dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jaringan sosial menunjukkan suatu afirmasi komunitas secara praktis bahwa mereka memiliki potensi yang dapat diandalkan.

³⁸ Parta Dasgupta dan Ismail Serageldin, *ibid*, 1999.

Semangat komunitas periferal berinisiatif menggalang kekuatan serta meramu kejamakan lokal berkongruensi-sinergis dengan proses pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Realitas demikian menandai bahwa pembangunan yang berpusat pada prakarsa dan logika lokal sudah saatnya untuk dilaksanakan. Ternyata jaringan sosial lokal dapat mendorong, memperkuat dan mewujudkan dinamika masyarakatnya.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini lebih diarahkan pada latar dan individu secara utuh (*holistik*)³⁹. Sedangkan Nasution menjelaskan bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar. Untuk itu peneliti harus turun ke lapangan dan berada di sana dalam waktu yang cukup lama⁴⁰. Penelitian ini bersifat induktif dan mencoba mencari dan menemukan suatu teori berdasarkan data lapangan juga bersifat fleksibel, artinya bisa berubah selama penelitian berlangsung berdasarkan temuan lapangan

Sejalan dengan sifatnya itu maka menurut Meleong⁴¹, metode kualitatif ini dipakai karena beberapa alasan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih

³⁹ Lasarus Jehamat, *Loc. Cit*, 2003.

⁴⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988.

⁴¹ C. Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdo Karya, Bandung, 1998, hal. 5.

mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda yang ada di lapangan pada saat penelitian. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Metode ini dipilih karena sifatnya fleksibel dan sesewaktu dapat berubah berdasarkan perkembangan penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini, studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian. Studi kasus merupakan suatu metode eksplorasi dan analisis mengenai kesatuan sosial, pribadi, institusi, kelompok, kebudayaan, maupun suatu kelompok masyarakat tertentu⁴². Artinya, meliputi semua dinamika serta apa implikasi dari dinamika tersebut hendaknya dilihat secara keseluruhan. Sementara Arikunto⁴³, menyebutkan studi kasus sebagai strategi penelitian yang mencoba menggambarkan subyek penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku, yakni tingkah laku beserta hal-hal yang melingkupinya, hubungan antara tingkah laku dengan timbulnya tingkah laku lain. Melihat suatu fenomena, masalah dan kausalitasnya dengan hal lain serta dampak dari kausalitas tersebut.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan fokus tulisan. Lokasi dan tema pokok tulis dan yang akan dibahas harus sesuai atau sekurang-kurangnya memiliki kaitan satu terhadap yang lainnya. Mengingat fokus tulisan tentang jaringan sosial sebagai modal sosial pada komunitas

⁴² Lasarus Jehamat, *Loc. Cit*, 2003.

⁴³ Lasarus Jehamat, *Loc. Cit*, 2003.

periferal, maka penulis memilih RW 01 Jagalan Ledoksari sebagai lokasi penelitian.

Pemilihan daerah Jagalan Ledoksari sebagai lokasi penelitian didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya. *Pertama*, berdasarkan tata letak (*geografis*) kampung Jagalan Ledoksari termasuk wilayah pusat kota yang berada dan sangat dekat dengan pusat Pemerintahan Propinsi, Kota Madya, Kraton, Malioboro dan sebagai pusat perekonomian sekaligus salah satu pusat pariwisata yang diminati para wisatawan. *Kedua*, secara fisik dan ekonomi kondisi warga dan komunitas tidak berjalan seiring dengan perkembangan ekonomi kota Yogyakarta secara keseluruhan. *Ketiga*, *stigma* masyarakat umum atas masyarakat di wilayah ini pada posisi rendah, baik dari dimensi sosial, ekonomi, kesehatan maupun budaya. Namun apakah semua asumsi dan *stigma* itu benar adanya? Apakah komunitas tidak memiliki modal lain dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan imunitas komunitasnya?

1.5.3 Jenis Data

1.5.3.1 Data Primer

Data primer biasanya didapat langsung dari informan. Peneliti bertemu langsung dengan informan melalui wawancara dan observasi. Wawancara atau dialog tatap muka (*face to face*) dapat dilakukan dengan wawancara yang berstruktur, tidak berstruktur maupun *in depth interview*. Observasi dilakukan melalui dua cara yaitu, observasi partisipatoris (terlibat langsung) dan non-partisipatoris (mengamat dan melihat tanpa terlibat langsung).

1.5.3.2 Data Sekunder

Data sekunder tidak berasal langsung dari informan, tetapi melalui hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, dokumen, statistik, foto-foto, kliping, dan gambar-gambar yang mempunyai kaitan dengan substansi tulisan. Data-data ini dapat mengarah sekaligus turut menunjang dan mendukung proses penelitian.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

1.5.4.1 Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya melalui dua cara, yaitu, observasi dan wawancara.

1. Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung, menulis segala informasi, data serta hal-hal yang sesuai dengan masalah penelitian. Observasi dilakukan dengan cara non-partisipasi, di mana peneliti tidak secara langsung berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat yang diteliti. Demi memperoleh data yang valid dan memadai maka observasi yang dilaksanakan perlu diikuti relasi, interaksi dan komunikasi yang intensif antara peneliti dan responden dengan tujuan meminimalisir kekeliruan pandangan antara keduanya.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tak berstruktur sebagai cara mendapatkan data. Wawancara tak berstruktur diambil karena langkah ini dapat membuat peneliti merasa bebas dan tidak terpengaruh oleh *draft* yang sudah dirancang bila memakai wawancara berstruktur.

Wawancara dipakai untuk mendapatkan data dan informasi yang pribadi dengan melakukan secara langsung terhadap responden. Menurut J.Vredendregt⁴⁴, dasar dari metode wawancara adalah mengumpulkan data mengenai sikap, kelakuan, pengalaman, cita-cita dan harapan seperti yang dikemukakan oleh informan atas pertanyaan peneliti. Kerja sama antara peneliti dengan informan sangat penting karena akan dapat menggali informasi sesuai dengan pandangan dan keadaan informan yang sesungguhnya.

1.5.4.2 Data Sekunder

Data sekunder berperan penting dalam menambah dan mendukung proses pengumpulan data. Dokumentasi ini mencakupi tulisan, buku-buku, dokumen, foto-foto, data statistik dan gambar-gambar yang mempunyai kaitan dan relevansi yang sama dengan permasalahan akan dibahas. Data inilah yang turut mendukung proses penelitian sampai taraf akhir.

1.5.5 Analisis Data

1.5.5.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu metode dalam penelitian kualitatif yang mana dari semua data yang ada diringkas atau dikurangi dan mencari data yang sesuai dengan inti tulisan. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan secara simultan (bersama-sama) dengan pengumpulan data, penafsiran data dan penulisan narasi laporan sementara. Cara ini populer disebut *eklektik*, artinya tidak lebih dari sekedar mengambil data dari sumber-sumber yang berbeda secara berulang-ulang dan bolak-balik sejauh mempunyai kaitan dengan fokus tulisan.

⁴⁴ J. Vredendregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1978, hal. 84.

1.5.5.2 Sajian Data

Sajian data didasarkan pada reduksi dan interpretasi atas data yang sudah ada. Peneliti memperlakukan semua data yang direduksi tadi dengan memasukan ke dalam sejumlah pola, kategori, atau tema tertentu dan kemudian menafsirkan beberapa skema tertentu pula. Semua data yang telah terkumpul ditampilkan dalam bentuk kotak-kotak. Lincoln dan Guba⁴⁵ menguraikan kategorisasi, seperti berikut ini. *Pertama*, mengelompokan kartu-kartu yang telah dibuat ke dalam bagian-bagian isi yang secara jelas berkaitan. *Kedua*, merumuskan aturan yang menguraikan kawasan kategori dan yang akhirnya dapat digunakan untuk menetapkan inklusi setiap kartu pada kategori dan juga sebagai dasar untuk pemeriksaan keabsahan data. *Ketiga*, menjaga agar setiap kategori yang telah disusun satu dengan yang lainnya mengikuti prinsip taat asas atau memiliki keterhubungan berdasarkan informasi yang valid. Pembuatan kategori ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi secara sistematis kepada pembaca dan mudah dipahami secara keseluruhan pula.

1.5.6 Penulisan Laporan

1.5.6.1 Laporan Parsial

Laporan parsial adalah laporan pada tahap penelitian sementara berlangsung. Pada tahap ini menurut Lincoln dan Guba⁴⁶ disebut juga "tugas organisasional" dari peneliti dan memiliki tiga tugas, antara lain: *pertama*, menyusun materi data sehingga bahan-bahan itu dapat secepatnya tersedia apabila diperlukan. *Kedua*, penyusunan kerangka laporan. Laporan tahap awal ini akan

⁴⁵ C. Lexy Meleong, *Op. Cit*, 1998, hal. 227.

⁴⁶ C. Lexy Meleong, *Op. Cit*, 1998, hal. 227.

beberapa kali mengalami perubahan. Namun yang paling penting agar peneliti mengusahakan supaya seluruh data dapat tercakup dalam kerangka itu. *Ketiga*, mengadakan uji silang antara indeks bahan data dengan kerangka yang baru disusun dan dilakukan secara berulang-ulang karena hasilnya akan menjadi dasar penulisan laporan komprehensif.

1.5.6.2 Laporan Komprehensif

Laporan ini tetap mengikuti kerangka yang telah disusun pada akhir tahap awal tadi. Pada tahap ini disertai penjajakan audit (mengawasi) sekaligus memungkinkan penulis untuk melaporkan fakta yang benar-benar fakta atas dasar sumber-sumber yang dapat ditunjukkan dan dengan demikian, peneliti benar-benar yakin untuk membuat pertanyaan yang senantiasa didukung oleh data. Penulis pada tahap ini hendaknya mengaitkannya dengan hasil penelaan kepustakaan atau penelitian terdahulu yang terkait dengan isi laporan akhir ini. Laporan komprehensif ini merupakan intisari sekaligus hasil akhir dari penelitian secara keseluruhan yang akan ditampilkan dalam rupa tulisan laporan.

1.5.7 Tahap-Tahap Penelitian

1.5.7.1 Tahap Pra-Lapangan

Tahap ini merupakan tahap permulaan di mana peneliti masih melihat permasalahan secara umum yang disertai dengan buku-buku bacaan yang mempunyai relevansi dan turut mempertajam pemahaman dalam rangka penentuan fokus tulisan. Di sini peneliti melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dan dengan itu peneliti mendapatkan informasi data yang bersifat umum. Informasi yang terkumpul diolah, diurai, dan dianalisis demi mendapatkan

hal-hal yang signifikan dan bermanfaat dalam penelitian selanjutnya. Tahap ini mengantar peneliti pada penentuan fokus penelitian.

1.5.7.2 Tahap Lapangan

Tahap ini, peneliti melakukan beberapa kegiatan, diantaranya, yaitu: mengumpul data, analisis data, laporan parsial dan laporan komprehensif sebagai laporan akhir. Tahap ini sudah semakin jelas di mana informasi dan data yang dikumpulkan dari informan sudah mengarah pada fokus penelitian. Observasi dan wawancara pada tahap ini dilakukan secara spesifik, khusus, terbuka sekaligus berstruktur. Dengan demikian informasi lebih mendalam sesuai fokusnya. Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti mencari sumber-sumber informasi secara intensif dan teliti melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan informan sehingga mendapatkan informasi yang mengarah pada pemahaman mendalam atas fokus yang diteliti.

1.5.7.3 Tahap Pasca-Lapangan

Pada tahap akhir ini, peneliti meng-*cross check* semua hasil temuan di lapangan dengan laporan hasil penelitian terdahulu, buku-buku, maupun dengan teori yang dipakai sebagai pisau analisa dalam penelitian tersebut. Lebih dari itu, informasi dan data yang terkumpul melalui pengamatan dan wawancara segera dipeta dan dianalisis dalam bentuk tulisan, berikutnya dilakukan pengecekan dengan informan. Pengecekan dilakukan dengan wawancara dan merangkumnya secara teliti kemudian meminta informan untuk memperbaiki dan mencocokkan informasi yang ditulis berdasarkan kenyataan lapangan. Seterusnya dilakukan penyusunan laporan sebagai rupa akhir dari sebuah penelitian.